



**RANCANGAN AKHIR  
RENCANA KERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
TAHUN 2023**

**DISDUKCAPIL**

**Sulseli**



## **KATA PENGANTAR**

Sebagai Dokumen Perencanaan Tahunan, Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 mempedomani kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang telah disusun dalam Rencana Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan dalam penyelenggaraan urusan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 serta aspirasi masyarakat atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Dokumen Rencana Akhir Renja ini akan menjadi pedoman dan panduan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan dalam merealisasikan kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan pembangunan urusan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sepanjang Tahun 2023 sesuai dengan rencana yang disusun.

Tiada gading yang tidak retak, oleh karena itu masukan, saran, dan pendapat yang konstruktif dari semua pihak sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi untuk lebih menyempurnakan dokumen Rencana Akhir Renja ini.

Makassar, Juli 2022

KEPALA DINAS

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,



**Hj. SUKARNIATY KONDOLELE, M.M**

Pangkat: Pembina Utama Madya

NIP. 19650606 199003 2 011

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2020 .....</b>	<b>7</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Dan Capaian Renstra SKPD .....	7
2.2. Analis Kinerja Pelayanan SKPD .....	19
2.3. Isu-Isu Pentingnya Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD .....	36
2.4. Review Terhadap RKPD .....	38
2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan .....	46
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>47</b>
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	44
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	48
3.3. Program dan Kegiatan Prioritas .....	50
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>52</b>
4.1 Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah .....	58
4.1 Pencapaian SDG's .....	59
4.1 Pengetasan Kemiskinan .....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
5.1. Kaidah Pelaksanaan .....	60
5.2. Penutup .....	60

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

##### **1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rancangan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan ini juga mengacu pada kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 dan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023.

##### **1.1.2 Proses Penyusunan Renja PD**

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan: Persiapan penyusunan renja meliputi: (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja

- Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah mencakup: (a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan (b) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
3. Penyusunan Rancangan Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan Rancangan Akhir RKPD.
  4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
  5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
  6. Penetapan Renja Perangkat Daerah yang menjadi dokumen perencanaan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.
  7. Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 menjabarkan rencana kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu **Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019** tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309).

### **1.1.3 Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan dari Rancangan Awal Renja sampai Rancangan Akhir Renja dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Rancangan Awal RKPD, dan Rancangan Akhir RKPD. Pada penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

1. Berpedoman pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan.

Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan Akhir RKPD. Rancangan renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan untuk diverifikasi. Hasil Verifikasi tersebut harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan Rancangan Akhir RKPD. Rancangan Renja hasil verifikasi tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD menjadi rancangan RKPD.

## **1.2. Landasan Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- q. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- r. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 0216 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
- t. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301).
- u. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309).
- v. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022 tentang RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 ini disusun dengan maksud:

1. Untuk menjabarkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan jangka pendek untuk Tahun 2023;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pembangunan daerah;
3. Menyelaraskan rencana strategis daerah dengan Renja Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis Perangkat Daerah

#### **1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

Tujuan disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 adalah:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan dalam jangka 1 tahun;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

**BAB I** merupakan Bab Pendahuluan yang memuat antara lain; Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

**BAB II** merupakan bab yang menjelaskan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu yang terdiri atas: Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang

**BAB III** merupakan bab yang menjelaskan Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah yang terdiri dari: Telaahan terhadap Kebijakan Nasional serta Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

**BAB IV** merupakan bab yang memuat Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah yaitu Program dan Kegiatan

**BAB V** bab ini menjelaskan tentang tentang penutup yang berisi ringkasan serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam implementasi Renja 2023.

**BAB II**

**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH**

**TAHUN LALU 2021**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Dan Capaian Renstra SKPD**

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 dan perkiraan pencapaian kinerja tahun 2022, serta progres pencapaian kinerja dalam Renstra periode 2018-2023 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan program, kegiatannya dan Sub Kegiatan.

Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran 5 (lima) kriteria sebagaiberikut:

**Tabel 2.1**

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % $\geq$	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

**Sumber Data: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017**

**Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021**

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 ini akan dijelaskan capain kinerja tujuan dan sasaran RPJMD. Pencapaian terhadap IKU Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara ringkas digambarkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Pengukuran	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	$\frac{\text{Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan} + \text{Jumlah KIA yang diterbitkan} + \text{Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP} + \text{Jumlah Anak usia 0-17 tahun kurang sehari} + \text{Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan}} \times 100\%$	75%	82,71
2.	Meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala provinsi	Indeks kepuasan pemanfaatan data kependudukan	Nilai Indeks Kepuasan Pemanfaatan Data Kependudukan	78	96,88

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 sebanyak 2 (dua) indikator Kinerja Utama. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh indikator memenuhi capaian kinerja di atas 89,79% atau kriteria **“Tinggi”**.

Evaluasi hasil Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 tentang capaian kinerja program dan kegiatan yang dikaitkan dengan target Renstra 2018 - 2023, RKPD Tahun 2021 dan RPJMD Provinsi Sulsel menunjukkan bahwa penganggaran dalam DPPA Tahun 2021 melebihi dari pagu anggaran yang ditargetkan dalam pagu Renja.

Untuk melihat perbandingan antara pagu Renja Tahun 2021 dan DPPA Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL TC.23  
PERBANDINGAN ANTARA PAGU RENJA DAN PAGU DPPA  
TAHUN 2021

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	PAGU ANGGARAN DALAM RENJA		PAGU ANGGARAN DALAM DPA		REALISASI		KET
				TAHUN 2021		KEUANGAN		%		
				Rp	Rp	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100	10,559,849,391.00	10,930,599,891.00	10,359,018,424.00	94.77		Melebihi Pagu Renja	
		Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100							
		Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100							
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk	97	199,641,100.00	449,639,600.00	360,290,800.00	80.13		Melebihi Pagu Renja	
		Persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	97,00%							
		Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk	100,00%							
		Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	30,00%							
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Bayi ber-Akta Kelahiran	0,97	383,648,600.00	433,649,600.00	344,822,300.00	79.52		Melebihi Pagu Renja	
		Persentase Pasangan ber-Akta Nikah	0,34							
		Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	95,00%							
		Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran	90,50%							
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	0,47							

4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan	100	405,096,800.00	578,196,800.00	456,821,050.00	79.01	Melebihi Pagu Renja
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Ketersediaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan Skala Provinsi	100	255,295,100.00	382,195,100.00	353,065,606.00	92.38	Melebihi Pagu Renja
		% Penyajian Profil dan data Kependudukan	100					
JUMLAH				11,803,530,991.00	12,774,280,991.00	11,874,018,180.00	92.95	

<b>TC.29</b>									
TAHUN 2020									
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
NO	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD TAHUN 2020		
1	2				3	4	5		
	1.02				Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				
	1.02	06			Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil				
	1.02	06	01.00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
	1.02	06	01.00	01	<b>PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Cakupan penerbitan akta kelahiran</b>	<b>99.40</b>		
						<b>Cakupan Perekaman KTP-el</b>	<b>100.0</b>		
						<b>Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan</b>	<b>64.0</b>		
						<b>Cakupan Kepemilikan KTP-el</b>	<b>99.11</b>		
	1.02	06	01.00	01	001 Bimtek Pelayanan Perekaman KTP-el	Jumlah peserta Bimtek	0.0		
	1.02	06	01.00	01	002 Fasilitasi Pelaksanaan Penerbitan KTP-el Kab/Kota	Jumlah Kabupaten/kota yang di fasilitasi	100.0		
	1.02	06	01.00	01	003 Rapat Koordinasi Tingkat Kab/Kota tentang Pencapaian Target Nasional Akta Kelahiran Anak 0-18 Tahun	Jumlah Peserta	20.0		
	1.02	06	01.00	01	004 Pembinaan Penerbitan Akta Kematian	Jumlah Peserta	0.0		
	1.02	06	01.00	01	007 Monitoring dan Evaluasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi dan monitoring	100.0		
	1.02	06	01.00	01	008 Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kependudukan Bagi Aparat Kab/Kota tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan	10.0		
						Jumlah Peserta	12.50		
	1.02	06	01.00	01	010 Pembinaan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian	Jumlah Peserta Sosialisasi	0.0		
	1.02	06	01.00	01	013 Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah koordinasi dan konsultasi pelayanan adminduk	14.17		
	1.02	06	01.00	01	014 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi dan monitoring	0.0		
					<i>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</i>		25.67		
					<i>Predikat Kinerja</i>		SR		
					<i>Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja</i>				
					<i>Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja</i>	<i>Capaian realisasi kinerja program pata Triwulan IV sementara masih menggunakan angka proyeksi dikarenakan Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester II tahun 2020 belum terbit.</i>			
					<i>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya</i>				
					<i>Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD/RENJA berikutnya</i>				
	1.02	06	01.00	02	<b>PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Cakupan Ketersediaan dan pemanfaatan database kependudukan skala provinsi</b>	<b>100.0</b>		
	1.02	06	01.00	02	003 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Jumlah Kegiatan Pengelolaan SIAK	20.0		
	1.02	06	01.00	02	004 Peningkatan Kapasitas Administrator Data Base Pengelola SIAK	Jumlah Peserta	0.0		
	1.02	06	01.00	02	006 Sosialisasi Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Jumlah Peserta Sosialisasi	14.63		
	1.02	06	01.00	02	008 Penyajian data dan Dokumen Kependudukan	Jumlah Dokumen Kependudukan yang tersedia	20.0		
	1.02	06	01.00	02	010 Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kependudukan Bagi Aparat Kab/Kota tentang PIAK, Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dan Petugas Pelayanan Adminduk (Front Office)	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	8.0		
					<i>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</i>		12.53		
					<i>Predikat Kinerja</i>		SR		
					<i>Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja</i>				
					<i>Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja</i>				
					<i>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya</i>				
					<i>Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD/RENJA berikutnya</i>				
	1.02	06	01.00	50	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>% Pemenuhan administrasi perkantoran</b>	<b>100.0</b>		

	1.02	06	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	338.46
	1.02	06	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	20.0
	1.02	06	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	100.0
	1.02	06	01.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	0.0
	1.02	06	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	19.41
						<i>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</i>		79.65
						<i>Predikat Kinerja</i>		T
						<i>Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja</i>		
						<i>Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja</i>		
						<i>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya</i>		
						<i>Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD/RENJA berikutnya</i>		
	<b>1.02</b>	<b>06</b>	<b>01.00</b>	<b>51</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran</b>	<b>100.0</b>
	1.02	06	01.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	0.0
	1.02	06	01.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	66.67
	1.02	06	01.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	33.33
	1.02	06	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	20.0
						<i>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</i>		30.0
						<i>Predikat Kinerja</i>		SR
						<i>Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja</i>		
						<i>Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja</i>		
						<i>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya</i>		
						<i>Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD/RENJA berikutnya</i>		
	<b>1.02</b>	<b>06</b>	<b>01.00</b>	<b>52</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA</b>	<b>% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu</b>	<b>100.0</b>
	1.02	06	01.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	7.50
	1.02	06	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	0.0
							Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	20.0
							Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	20.0
							Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	20.0
								13.50
						<i>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</i>		SR
						<i>Predikat Kinerja</i>		
						<i>Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja</i>		
						<i>Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja</i>		
						<i>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya</i>		
						<i>Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD/RENJA berikutnya</i>		
	<b>1.02</b>	<b>06</b>	<b>01.00</b>	<b>53</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>% ASN berkinerja sangat baik</b>	<b>0.0</b>
						<i>Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja</i>		
						<i>Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja</i>		
						<i>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya</i>		
						<i>Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD/RENJA berikutnya</i>		

**TABEL TC.29**  
**TAHUN 2021 DAN 2022 TW.II**  
**FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NO	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
										Target Renja OPD tahun 2021 (n-2)	Realisasi Ranja OPD tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2021		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan(tahun 2022 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tahun 2022
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
	2	12	0.00.0.00.2 0.00			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
	2	12	0.00.0.00.2 0.00	2.12 .02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk ber KTP persatuan Penduduk %		96	95.43	99.41	97.0	65.0	67.01	
							Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk %		100	101.09	101.09	100.0	75.0	75.0	
							Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) %		25	32.08	128.32	30.0	25.0	83.33	
							Persentase penerbitan KTP %		96	95.43	99.41	97.0	75.0	77.32	
	2	12	0.00.0.00.2 0.00	2.12 .02	1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentasi Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan Pendaftaran Penduduk %		100	100	100	100.0	50.0	50.0	
	2	12	0.00.0.00.2 0.00	2.12 .02	1.01	3 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Peserta rapat Orang		50	0	0	50.0	50.0	100.0	
							Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi Kab/Kota		4	5	125	8.0	2.0	25.0	
	2	12	0.00.0.00.2 0.00	2.12 .02	1.01	5 Penyusunan Tata Cara Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi Kab/Kota		4	7	175	6.0	2.0	33.33	
							Jumlah Kab/Kota yang Melakukan Pelayanan Adminduk Kab/Kota		24	24	100	0.0	0.0	0.0	
							Jumla Peserta Orang		50	0	0	0.0	0.0	0.0	
							Jumlah Dokumen Dokumen		1	0	0	1.0	0.0	0.0	

2	12	0.00.0.00.2 0.00	2.12 .02	1.02		<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>	<b>Persentasi Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	%		100	100	100	100.0	50.0	50.0
2	12	0.00.0.00.2 0.00	2.12 .02	1.02	1	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	Kab/Kota		3	7	233.33	8.0	0.0	0.0
							Jumlah peserta	Orang		80	0	0	0.0	0.0	0.0
							Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi	Kab/Kota		24	24	100	24.0	15.0	62.50
2	12	0.00.0.00.2 0.00	2.12 .02	1.03		<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>	<b>Persentasi Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	%		100	100	100	100.0	50.0	50.0
2	12	0.00.0.00.2 0.00	2.12 .02	1.03	2	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kab/Kota yang di kunjungi	Kab/Kota		5	16	320	12.0	3.0	25.0
							Jumlah Peserta	Orang		80	80	100	50.0	0.0	0.0
2	12	0.00.0.00.2 0.00	2.12 .03			<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase Bayi ber akte kelahiran</b>	%		95	94.57	99.55	97.0	65.0	67.01
							<b>Persentase Penduduk umur 0-17 Tahun dengan kepemilikan akte kelahiran</b>	%		86.2	90.75	105.28	87.37	55.0	62.95
							<b>Persentase Pasangan ber akte nikah</b>	%		31	36.08	116.39	34.0	25.0	73.53
							<b>Persentase penerbitan akta kelahiran</b>	%		93.7	90.17	96.23	94.0	65.0	69.15
							<b>Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran</b>	%		45	47.79	106.2	46.0	25.0	54.35
							<b>Persentase Akta Kematian yang diterbitkan</b>	%		100	100	100	100.0	100.0	100.0
2	12	0.00.0.00.2 0.00	2.12 .03	1.02		<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi</b>	<b>Persentasi Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	%		100	100	100	100.0	50.0	50.0
2	12	0.00.0.00.2 0.00	2.12 .03	1.02	1	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	Kab/Kota		5	10	200	8.0	4.0	50.0
							Jumlah peserta	Orang		50	0	0	30.0	0.0	0.0
2	12	0.00.0.00.2 0.00	2.12 .03	1.02	2	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	Kab/Kota		6	18	300	15.0	2.0	13.33
							Jumlah peserta	Orang		50	0	0	50.0	0.0	0.0
2	12	0.00.0.00.2 0.00	2.12 .03	1.03		<b>Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentasi Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	%		100	100	100	100.0	50.0	50.0
2	12	0.00.0.00.2 0.00	2.12 .03	1.03	1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi dan monitoring	Kab/Kota		24	24	100	24.0	3.0	12.50
							Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	Kab/Kota		6	12	200	12.0	3.0	25.0
2	12	0.00.0.00.2 0.00	2.12 .04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase Ketersedian dan Pemanfaatan Database Kependudukan Skala Provinsi</b>	%		100	100	100	100.0	50.0	50.0
2	12	0.00.0.00.2 0.00	2.12 .04	1.01		<b>Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentasi Pengelolaan Data Kependudukan skala provinsi</b>	%		100	100	100	100.0	50.0	50.0

												60.0	0.0	0.0	
2	12	0.00.0.00.2 0.00	2.12 .04	1.01	2	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta	Orang		60	0	0			
							Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	Kab/Kota		7	8	114.29	7.0	3.0	42.86
2	12	0.00.0.00.2 0.00	2.12 .04	1.02		<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>	<b>Persentase Kab/Kota/OPD/Lembaga yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	%		100	100	100	100.0	50.0	50.0
2	12	0.00.0.00.2 0.00	2.12 .04	1.02	2	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta	Orang		50	0	0	50.0	0.0	0.0
							Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	Kab/Kota		11	7	63.64	5.0	2.0	40.0
2	12	0.00.0.00.2 0.00	2.12 .04	1.02	5	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Perjanjian Kerjasama	PKS		3	1	33.33	4.0	1.0	25.0
							Jumlah Kab/Kota yang Dikunjungi	Kab/Kota		7	12	171.43	8.0	5.0	62.50
2	12	0.00.0.00.2 0.00	2.12 .04	1.03		<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>	<b>Persentase Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	%		100	100	100	100.0	50.0	50.0
2	12	0.00.0.00.2 0.00	2.12 .04	1.03	1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	Kab/Kota		8	8	100	4.0	2.0	50.0
							Jumlah peserta	Orang		60	60	100	50.0	0.0	0.0
2	12	0.00.0.00.2 0.00	2.12 .04	1.03	2	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	Kab/Kota		5	5	100	12.0	0.0	0.0
							Jumlah peserta	Orang		60	0	0	50.0	0.0	0.0
2	12	0.00.0.00.2 0.00	2.12 .05			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase Penyajian Profil Kependudukan</b>	%		100	100	100	100.0	50.0	50.0
2	12	0.00.0.00.2 0.00	2.12 .05	1.01		<b>Penyediaan Profil Kependudukan</b>	<b>Persentase Ketersediaan Profil dan data Kependudukan skala Provinsi</b>	%		100	100	100	100.0	50.0	50.0
2	12	0.00.0.00.2 0.00	2.12 .05	1.01	1	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen	Dokumen		3	3	100	3.0	0.0	0.0
							Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	Kab/Kota		10	8	80	12.0	0.0	0.0
2	12	0.00.0.00.2 0.00	XX X.0 1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP</b>	%		100	100	100	100.0	50.0	50.0



2	12	0.00.0.00.2 0.00	XX X.0 1	1.05	5	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		1	0	0	0.0	0.0	0.0
2	12	0.00.0.00.2 0.00	XX X.0 1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta	Orang		7	0	0	0.0	0.0	0.0
2	12	0.00.0.00.2 0.00	XX X.0 1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang		50	50	100	50.0	0.0	0.0
2	12	0.00.0.00.2 0.00	XX X.0 1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang		50	110	220	50.0	0.0	0.0
2	12	0.00.0.00.2 0.00	XX X.0 1	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentasi Keterpenuhan Kebutuhan Administrasi Umum</b>	%		100	100	100	100.0	50.0	50.0
2	12	0.00.0.00.2 0.00	XX X.0 1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia	Jenis		10	10	100	6.0	0.0	0.0
2	12	0.00.0.00.2 0.00	XX X.0 1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Jenis		1	1	100	8.0	0.0	0.0
2	12	0.00.0.00.2 0.00	XX X.0 1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang Tersedia	Jenis		10	10	100	3.0	3.0	100.0
2	12	0.00.0.00.2 0.00	XX X.0 1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	Kali		24	130	541.67	15.0	10.0	66.67
2	12	0.00.0.00.2 0.00	XX X.0 1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis	Laporan		1	1	100	15.0	6.0	40.0
2	12	0.00.0.00.2 0.00	XX X.0 1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Terselenggara	Orang		50	0	0	1.0	0.0	0.0
2	12	0.00.0.00.2 0.00	XX X.0 1	1.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	Unit		27	13	48.15	14.0	0.0	0.0
2	12	0.00.0.00.2 0.00	XX X.0 1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel Yang Tersedia	Unit		13	13	100	14.0	0.0	0.0
2	12	0.00.0.00.2 0.00	XX X.0 1	1.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Tersedia	Unit		4	0	0	0.0	0.0	0.0
2	12	0.00.0.00.2 0.00	XX X.0 1	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentasi pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%		100	100	100	100.0	50.0	50.0
2	12	0.00.0.00.2 0.00	XX X.0 1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi yang Terpenuhi	Unit		1	1	100	1.0	0.0	0.0
2	12	0.00.0.00.2 0.00	XX X.0 1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Terpenuhi	Orang		22	21	95.45	22.0	22.0	100.0
2	12	0.00.0.00.2 0.00	XX X.0 1	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	Unit		22	10	45.45	25.0	8.0	32.0
2	12	0.00.0.00.2 0.00	XX X.0 1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpenuhi	Unit		1	1	100	1.0	1.0	100.0
2	12	0.00.0.00.2 0.00	XX X.0 1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional yang Terpenuhi	Unit		9	7	77.78	9.0	7.0	77.78
2	12	0.00.0.00.2 0.00	XX X.0 1	1.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Terpelihara	Unit		11	0	0	22.0	0.0	0.0
2	12	0.00.0.00.2 0.00	XX X.0 1	1.09	9	PemeliharaanRehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	Unit		1	2	200	2.0	0.0	0.0

## **2.2. Analis Kinerja Pelayanan SKPD**

Kinerja Pelayanan Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan telah memenuhi standar. Dimana proses kegiatan dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Dan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memenuhi standar operasional pelayanan yang telah ditentukan.

Adapun analisis kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu sampai dengan Desember Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

### **2.2.1**



#### **Sasaran Strategis 1**

#### **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.**

Dalam kaitannya dengan kebijakan reformasi birokrasi saat ini, capaian akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah menjadi suatu hal penting dan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus menerus dilakukan, mulai dari menyempurnakan system akuntabilitas kinerja, menyusun dan menerapkan system manajemen kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja, system monitoring dan evaluasi sampai kepada penyusunan indikator kinerja. Indikator tercapainya sasaran 1 (satu) yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah , yaitu :1). Nilai SAKIP OPD; 2). Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik dan Sangat Baik; 3). Rata-Rata Capaian Kinerja Daerah; dan 4). Persentase Temuan Material. Pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja, perencanaan, dan pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

#### **a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja pada sasaran 1 (satu) yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dapat diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel III-3**

**Perbandingan Antara Target dan Realisasi**

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Nilai sakip OPD	71	Belum ada hasil Penilaian	
2	%ASN Nilai SKP Kategori baik dan sangat baik	100%	100%	100
3	Rata-rata capaian kinerja daerah (Evaluasi dokumen perencanaan)	100%	100%	100
4	Persentase temuan material	0%	0%	100

Berdasarkan hasil pengukuran indikator Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan, dan pengelolaan keuanganperangkat daerah, dapat disimpulkan bahwa sasaran kinerja 1 (satu) telah mencapai target, dari empat indikator kinerja yang ada, ketiganya telah mencapai nilai sangat tinggi dengan nilai  $\geq 91\%$ , bahkan mencapai target 100%. Namun dari keempat indikator kinerja yang ada masih terdapat satu indikator yang belum memiliki nilai yang disebabkan belum keluarnya hasil penilaian atas evaluasi nilai SAKIP oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.

**b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahunsebelumnya**

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 dengan tahun- tahun sebelumnya untuk indikator kinerja pada sasaran 1 (tiga) yaitu Meningkatkan akuntabilitas kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III-4**

**Perbandingan Antara Realisasi 3 tahun terakhir**

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021
1	Nilai saki OPD	70,20	75,27	Belum ada hasil Penilaian
2	%ASN Nilai SKP Kategori baik dan sangat baik	97%	100%	100%
3	Rata-rata capaian kinerja daerah (Evaluasi dokumen perencanaan)	100%	98%	100%
4	Persentase temuan material	0,06%	0%	0%

Pencapaian yang telah diperoleh dari tahun ke tahun untuk sasaran kinerja 1 (satu) menunjukkan hasil yang lebih baik. Terdapat peningkatan dalam capaian target kinerja yang telah ditentukan. Berdasarkan data tabel diatas, bahwa dari keempat target kinerja yang ada terdapat tiga indikator kinerja yang telah mencapai target dalam realisasinya. Sedangkan untuk indikator Nilai saki OPD, pada tahun 2021 masih belum memperoleh nilai hasil evaluasi dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional.**

Perbandingan realisasi Indikator pada sararan 3 (tiga) Tahun 2021 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III-5**

**Perbandingan Realisasi Kinerja 2021, Jangka Menengah dan Nasional**

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		2021	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1	Nilai SAKIP OPD	71	81	-
2	Persentase temuan material	0%	0%	-
3	Rata-rata capaian kinerja daerah (Evaluasi dokumen perencanaan)	100%	100%	-
4	%ASN Nilai SKP Kategori baik	100%	100%	-

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan kinerja tahun 2021 terdapat keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Ada beberapa indikator capaian kinerja yang melampaui target dan mendekati target, diantaranya adalah:

1. Indikator Nilai SAKIP OPD

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2021 adalah 71 sedangkan indikator Nilai sakip OPD, pada tahun 2021 masih belum memperoleh nilai hasil evaluasi dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Kesesuaian antara rencana strategis dan rencana kerja SKPD yang direncanakan dalam perjanjian kinerja menjadi salah satu indikator tercapainya kinerja. Selain itu kemampuan SDM yang bertanggung jawab dalam penanganan SAKIP yang masih perlu ditingkatkan serta didukung oleh komitmen OPD untuk memperbaiki akuntabilitas kinerja.

2. Indikator Persentase Temuan Material

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2021 adalah 0% sedangkan realisasinya telah mencapai 0%, Sehingga dapat diketahui bahwa indikator ini telah mencapai nilai realisasi 100%. Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Dalam pelaksanaannya di tahun 2021 tidak ditemukan temuan material karena pelaksanaan pengelolaan keuangan pada tahun 2021 tetap mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu koordinasi yang dilakukan dengan stakeholder terkait yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan juga senantiasa dilaksanakan guna meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian pencapaian target dapat terealisasi dengan capaian 100% pada akhir tahun 2021 pelaksanaannya selalu mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan serta senantiasa melakukan koordinasi dalam pelaksanaan anggaran pada lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3. Indikator Rata-rata capaian kinerja daerah

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2021 adalah 100% sedangkan realisasinya telah mencapai 100%, sehingga dapat diketahui bahwa indikator ini telah mencapai nilai realisasi 100%. Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Adanya sinkronisasi antar dokumen perencanaan serta dalam pelaksanaan kegiatan selalu memperhatikan dan berkomitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Indikator Persentase ASN dengan nilai SKP kategori baik

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2021 adalah 100% sedangkan realisasinya telah mencapai 100%, Sehingga dapat diketahui bahwa indikator ini telah mencapai nilai realisasi 100%. Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Bahwa semua pegawai telah melakukan tugas pokok dan fungsi secara optimal sebagai aparatur Pemerintah Provinsi yang professional dan bertanggungjawab.

**e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2020 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 (satu) Program sebesar Rp. 10.930.599.891,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.359.018.424,00 atau 94,77% dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%.

**Tabel III-6**

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

NO	URAIA N	ANGGARAN TA 2021	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.930.599.891,00	10.359.018.424,00	94,77%
	<b>Jumlah</b>	<b>10.930.599.891,00</b>	<b>10.359.018.424,00</b>	<b>94,77%</b>

2.2.2

## Sasaran Strategis 2

### Meningkatnya Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Peningkatan pemenuhan dokumen administrasi kependudukan masyarakat merupakan sasaran utama dalam pembangunan sebagai pemenuhan hak konstitusi warga negara dan menciptakan data kependudukan yang akurat. Dengan data yang valid, kualitas perencanaan dalam pembangunan bisa lebih baik, karena penduduk merupakan bagian terpenting dalam suatu negara dilihat dari kuantitas dan kualitas.

Sasaran Meningkatkan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan diukur melalui 10 (sepuluh) indikator kinerja, yaitu :1). Persentase Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk; 2). Persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3). Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP); 4). Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA); 5). Persentase Bayi ber-Akta Kelahiran; 6). Persentase Pasangan ber-Akta Nikah; 7). Persentase Penerbitan Akta Kelahiran; 8). Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran; 9). Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran; 10) Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan.

Analisis pencapaian kinerja dari 10 (sepuluh) indikator kinerja di atas dapat dijelaskan dengan menggunakan perbandingan sebagai berikut:

#### a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Nilai SAKIP diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel III-7**

#### Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk	96%	96,43%	100,44%
2	Persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	96%	96,43%	100,44%

3	Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100%	102,18%	102,18%
4	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	25%	40,14%	160,56%
5	Persentase Bayi ber-Akta Kelahiran	95%	96,89%	101,98%
6	Persentase Pasangan ber-Akta Nikah	31%	39,52%	127,48%
7	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	93,70%	96,24%	102,71%
8	Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran	86,20%	93,99%	109,03%
9	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	45%	49,52%	110,04%
10	Persentase Penerbitan Akta Kematian	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran indikator Sasaran 2 Meningkatnya Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dapat disimpulkan bahwa sasaran kinerja 2 telah mencapai target. Karenadari 10 indikator kinerja secara keseluruhan bernilai sangat tinggi dengan nilai  $\geq$  91%, bahkan indikator Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) mencapai angka 160,56% melebihi target 100%.

**b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya**

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III-8**

**Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (tiga) Tahun terakhir**

No.	Indikator Kinerja	2019	2020	2021
1	Persentase Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk	94%	94%	96,43%
2	Persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	94,39%	94,43%	96,43%
3	Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP)	97,67%	99,80%	102,18%
4	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	0%	18,17%	40,14%
5	Persentase Bayi ber-Akta Kelahiran	92%	94%	96,89%
6	Persentase Pasangan ber-Akta Nikah	26%	32%	39,52%

7	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	86,14%	94,28%	96,24%
8	Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran	83,85%	85,49%	93,99%
9	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	43,35%	46,54%	49,52%
10	Persentase Penerbitan Akta Kematian	100%	100%	100%

Ada beberapa Indikator Kinerja yang baru dilaksanakan diantaranya Cakupan Penertiban Kartu Identitas Anak yang efektif dan menjadi target Nasional mulai pada 2020, Rasio Pasangan Ber Akta Nikah dan Persentase Penduduk Umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran yang menjadi target kinerja mulai tahun 2019. Sehingga indikator kinerja pada sasaran “Meningkatkan kualitas administrasi kependudukan” dari 2018 sampai tahun 2021 selalu mengalami tren peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah optimal dalam upaya peningkatan pemenuhan terkait dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategisdan standar nasional.**

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah, dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III-9**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 2021, Jangka Menengah**  
**dan Nasional**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		2021	Target Jangka Menengah	Target Nasiona l
1	Persentase Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk	96%	98%	-
2	Persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	96%	98%	-
3	Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100%	100%	-
4	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	25%	40%	20%
5	Persentase Bayi ber-Akta Kelahiran	95%	98%	-
6	Persentase Pasangan ber-Akta	31%	37%	-

	Nikah			
7	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	93,70 %	95%	92%
8	Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran	86,20 %	90,10 %	-
9	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	45%	47%	-
10	Persentase Penerbitan Akta Kematian	100%	100%	-

Target Nasional di Tahun 2021 yang dicanangkan oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya ada 2 (dua) Indikator dari 10 indikator yang menjadi target kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Cakupan Penertiban Kartu Identitas Anak dan Cakupan Penertiban Akta Kelahiran. Perbandingan antara target tahun 2021, Target Jangka Menengah, dan Nasional Nilai 10 indikator pada sasaran 2 (dua) yang diraih Tahun 2021 menunjukkan trend yang positif, dimana nilai realisasi telah mendekati nilai target jangka menengah. Sedangkan jika dibandingkan dengan target nasional maka 2 indikator telah mencapai indikator nasional.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan kinerja tahun 2021 terdapat keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Ada beberapa indikator capaian kinerja yang melampaui target dan mendekati target, diantaranya adalah:

1) Indikator Persentase Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2021 adalah 96%, sedangkan realisasinya mencapai 96,43% sehingga capaian kinerja sebesar 100,44% dan dapat dimasukkan dikategori **“Sangat Tinggi”**. Penyebab belum tercapainya indikator ini adalah:

Adanya pandemi covid-19 membuat perubahan pada prosedur pengambilan blangko, selain itu Kondisi geografis setiap Kabupaten/Kota yang berbeda membuat terjadinya kesulitan akses untuk ke kantor dukcapil kabupaten/kota seperti yang terjadi di Kabupaten Selayar dan Kabupaten Pangkep yang wilayahnya terdiri dari banyak pulau-pulau.

2) Indikator Persentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2021 adalah 96 %, sedangkan realisasinya mencapai 96,43 % sehingga capaian kinerja sebesar 100,44 % dan dapat dimasukkan dikategori "**Sangat Tinggi**". Penyebab belum tercapainya indikator ini adalah:

Adanya keterbatasan sarana dan prasarana sehingga menghambat Penerbitan KTP, selain itu Kondisi geografis yang berbeda, membuat akses jaringan di setiap daerah juga berbeda, sedangkan selama pandemi Covid-19 semua pelayanan beralih menjadi pelayanan online.

3) Indikator Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2021 adalah 100 %, sedangkan realisasinya mencapai 102,18 % sehingga capaian kinerja sebesar 102,18 % dan dapat dimasukkan dikategori "Sangat Tinggi" karena telah melampaui target yang telah ditetapkan. Penyebab telah tercapainya indikator ini adalah :

Sosialisasi yang masif dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat terkait perekaman KTP mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota senantiasa dihimbau untuk melakukan kegiatan jemput bola guna melakukan perekaman KTP-el di kantong-kantong perekaman seperti sekolah-sekolah, lembaga permasyarakatan atau di tempat lainnya yang dianggap memiliki banyak penduduk belum melakukan perekaman KTP-el.

4) Indikator Persentase Penerbitan Kartu Tanda Identitas Anak

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2021 adalah 25 %, sedangkan realisasinya mencapai 40,14% sehingga capaian kinerja sebesar 160,56 % dan dapat dimasukkan dikategori "**Sangat Tinggi**". Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Sosialisasi yang masif dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat terkait perekaman KTP mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

5) Indikator Persentase Bayi Ber-Akta Kelahiran

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2021 adalah 95%, sedangkan realisasinya mencapai 96,89% sehingga capaian kinerja sebesar 101,98% dan dapat dimasukkan dikategori "**Sangat Tinggi**" karena telah melampaui target yang telah ditetapkan. Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Sosialisasi yang selalu dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat terkait Akta Kelahiran sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan juga didukung oleh Kerjasama dengan Rumah Sakit terkait penerbitan Akta Kelahiran. Selain itu inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan pengurusan dan melengkapi dokumen persyaratan secara online.

6) Indikator Persentase Pasangan Ber Akta Nikah

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2021 adalah 31%, sedangkan realisasinya mencapai 39,52% sehingga capaian kinerja sebesar 127,48 % dan dapat dimasukkan dikategori "**Sangat Tinggi**" karena telah melampaui target yang telah ditetapkan. Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Sosialisasi yang selalu dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat terkait Pentingnya Akta Nikah sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan juga didukung oleh Kerjasama dengan Kantor Wilayah Agama terkait penerbitan dan pelaporan Akta Nikah.

7) Indikator Persentase Penerbitan Akta Kelahiran

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2021 adalah 93,70%, sedangkan realisasinya mencapai 96,24% sehingga capaian kinerja sebesar 102,71% dan dapat dimasukkan dikategori "**Sangat Tinggi**" karena telah melampaui target yang telah ditetapkan. Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Sosialisasi yang selalu dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat terkait Akta Kelahiran sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan juga didukung oleh Kerjasama dengan Rumah Sakit terkait

penerbitan Akta Kelahiran. Selain itu inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan pengurusan dan melengkapi dokumen persyaratan secara online.

- 8) Indikator Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan kepemilikan akta kelahiran Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2021 adalah 86,20%, sedangkan realisasinya mencapai 93,99 % sehingga capaian kinerja sebesar 109,03% dan dapat dimasukkan dikategori "**Sangat Tinggi**". Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Sosialisasi yang masif dilakukan oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA) kepada masyarakat terkait pentingnya pendaftaran pernikahan dan kepemilikan akta nikah sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

- 9) Indikator Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2021 adalah 45%, sedangkan realisasinya mencapai 49,52% sehingga capaian kinerja sebesar 110,04% dan dapat dimasukkan dikategori "**Sangat Tinggi**". Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Sosialisasi yang masif dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat terkait Kepemilikan akta kelahiran mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

- 10) Persentase Penerbitan Akta Kematian Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2021 adalah 100%, sedangkan realisasinya mencapai 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% dan dapat dimasukkan dikategori "**Sangat Tinggi**".

#### **e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 2 Program sebesar Rp 883.289.200,00 dengan realisasi sebesar Rp 705.113.100,00 atau 79,83% dengan capaian kinerja sasaran sebesar 114,28%.

Tabel III-10

## Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2021	REALISASI	%
1	Program Pendaftaran Penduduk	449.639.600,00	360.290.800,00	80,13%
2	Program Pencatatan Sipil	433.649.600,00	344.822.300,00	79,52%
	<b>Jumlah</b>	<b>883.289.200,00</b>	<b>705.113.100,00</b>	<b>79,83%</b>

## 2.2.3



### Sasaran Strategis 3

#### Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi

Salah satu sasaran yang ingin dicapai melalui pemanfaatan data kependudukan skala provinsi adalah untuk menunjang pelayanan publik. Dalam rangka membangun Big Data yang berbasis data kependudukan menuju satu data Indonesia, untuk mewujudkan hal ini perlu kerja keras dan inovasi dari setiap instansi yang menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk mengajak OPD ataupun Lembaga lainnya agar mau bekerja sama dan memanfaatkan data administrasi kependudukan sebagai data dasar dalam melakukan pelayanan. Data kependudukan yang terintegrasi inilah yang diharapkan akan digunakan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis pencapaian sebagai berikut:

#### a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja "Indeks Kepuasan Pemanfaatan Data" diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel III-11**

**Perbandingan Antara Target dan Realisasi**

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Pemanfaatan Data	78	96,88	124,20%

Berdasarkan pengukuran pencapaian Sasaran Strategis 3 yaitu **“Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi”** belum ada penilaian dikarenakan indeks kepuasan pemanfaatan data masih dalam proses penilaian dan evaluasi pada bidang yang berwenang.

**b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya**

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya untuk indikator kinerja indeks kepuasan pemanfaatan data kependudukan skala provinsi, dapat dilihat padatable berikut:

**Tabel III-12**

**Perbandingan Realisasi Kinerja 3 Tahun terakhir**

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021
1	indeks kepuasan pemanfaatan data	-	-	96,88

Realisasi capaian indeks kepuasan pemanfaatan data Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 masih dalam proses penilaian dan evaluasi pada bidang yang berwenang, sedangkan data untuk tahun 2019 dan tahun 2020 belum ada dikarenakan indikator ini baru dimulai pada tahun 2021.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional.**

Perbandingan realisasi indeks kepuasan pemanfaatan data kependudukan skala provinsi Tahun 2021 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III-13**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 2021, Jangka Menengah dan Nasional**

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		2021	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1.	indeks kepuasan pemanfaatan data	96,88	85	78

Realisasi Target Kinerja Tahun 2021 untuk indikator indeks kepuasan pemanfaatan data kependudukan skalaprovisi adalah 78, namun jika membandingkan dengan target jangka menengah maka nilai realisasi 2021 belum mencapai target. Hal ini karena target jangka menengah merupakan target kumulatif untuk satu periode pelaksanaan RPJMD sedangkan target 2021 hanya mengukur realisasi kinerja tahun berjalan sehingga sulit untuk dilakukan perbandingan, akan tetapi yang mampu diukur adalah kemampuan OPD untuk mencapai target keseluruhan jumlah OPD pada akhir jangka menengah yaitu 85.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

Realisasi capaian indeks kepuasan pemanfaatan data belum dapat dianalisis penyebab kegagalan/keberhasilannya dikarenakan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 masih dalam proses penilaian dan evaluasi pada bidang yang berwenang, sedangkan data untuk tahun 2019 dan tahun 2020 belum ada dikarenakan indikator ini baru dimulai pada tahun 2021.

**e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2020 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 2 (dua) Program sebesar Rp. 960.391.900,00 dengan realisasi sebesar Rp 809.886.656,00 atau 85,70% dengan capaian kinerja sasaran sebesar 69,33%.

**Tabel III-14**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2021	REALISASI	%
1	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	578.196.800,00	456.821.050,00	79,01%
2	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	382.195.100,00	353.065.606,00	92,38%
	<b>Jumlah</b>	960.391.900,00	809.886.656,00	85,70

TABEL TC.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2018-2023

No	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	TARGET IKK	TARGET RENSTRA OPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Perekaman KTP-EI			100	100	100	100	101.09		100	100	
2	Persentase penerbitan akte kelahiran		√	93.70%	94.00%	95.00%	95.00%	94.92		95.00%	95.00%	
3	Persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)		√	96%	97%	98%	98%	97.38		98%	98%	
4	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran			86.20%	87.37%	90.10%	90.10%	100.72		90.10%	90.10%	
5	Persentase bayi berakta kelahiran		√	95%	97%	98%	98%	96.50		98%	98%	
6	Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk		√	96%	97%	98%	98%	97.38		98%	98%	

**RANCANGAN AKHIR RENJA 2023**

7	Jumlah lembaga pengguna pemanfaatan data administrasi kependudukan											
8	Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak			25%	30%	40%	40%	80.20		40%	40%	
9	Persentase pasangan ber akta nikah		√	31%	34%	37%	37%	97.51		37%	37%	
10	Nilai SAKIP OPD			71	75	81	81	-		81	81	
11	Presentase temuan material			0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	
12	Rata-rata capaian kinerja daerah (evaluasi dokumen perencanaan)			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
13	Presentase ASN nilai SKP kategori baik			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	

### **2.3. Isu-Isu Pentingnya Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD**

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Kriteria penentuan isu-isu strategis mencakup:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional.
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah
3. Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani

Berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah yang berkenaan dengan penentuan isu-isu strategis, akan dijelaskan kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh Gubernur diatur dalam UU No 23 Tahun 2006 dan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mencakup:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
2. Pemberian Bimbingan Supervisi dan Konsultasi Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
3. Pembinaan dan Sosialisasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
4. Penyajian Data Kependudukan Berskala Provinsi Berasal dari Data Kependudukan yang Telah Dikonsolidasikan dan Dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab; dan
5. Koordinasi Pengawasan atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ruang lingkup pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terdiri dari 4 (empat) Sub Urusan :

1. Pendaftaran Penduduk;
2. Pencatatan Sipil;
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
4. Profil Kependudukan,

Dalam implementasi pembagian kewenangan urusan tersebut, pemerintah daerah provinsi diberikan terbatas hanya pada penyusunan profil kependudukan, sedangkan tiga kewenangan yang lainnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan kriteria diatas berikut diproyeksikan kondisi-kondisi dan isu-isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang terkait dengan pelaksanaan dan kewenangan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil oleh Pemerintah provinsi. Isu-isu strategis yang dimaksud yaitu :

1. Pemanfaatan data kependudukan yang belum terlaksana  
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan mengamanahkan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkomitmen untuk mendorong pemanfaatan data kependudukan khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi. Lebih lanjut bahwa ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 102 Tahun 2019 mengamanahkan bahwa perjanjian kerja sama yang ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 102 Tahun 2019, wajib disesuaikan dengan permendagri dimaksud.
2. Rencana pelaksanaan Pilkada Serentak akan digelar pada Tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai perangkat daerah yang terkait dalam penyiapan data SIAK, mesti mencermati kondisi tersebut dan mempersiapkan berbagai kebutuhan dalam menyambut pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.
3. Capaian perekaman penduduk masih dibawah target nasional  
Kondisi capaian perekaman penduduk pada semester II tahun 2019 adalah 98,88%. Persentase ini masih dibawah target nasional 100%, ditambah lagi dengan persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 yang mewajibkan wajib pilih memiliki KTP-el, maka kondisi capaian perekaman mesti menjadi concern dinas ini.
4. Masih kurangnya kesadaran penduduk tentang pentingnya akte kelahiran.  
Cakupan penerbitan akta kelahiran untuk tahun 2019 baru 86,14%, dan masih dibawah dibandingkan capaian provinsi-provinsi lain di Republik Indonesia. Penyebab masih kurangnya capaian ini karena kesibukan orang tua dan minimnya pengetahuan masyarakat akan persyaratan membuat akta kelahiran, juga karena masih banyaknya akta kelahiran yang sebelumnya telah diterbitkan secara konvensional sehingga belum terintegrasi.
5. Masih rendahnya cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak sebagai upaya pemenuhan identitas kependudukan bagi seluruh penduduk khususnya bagi anak

kurang dari 17 tahun dan belum menikah. Data kepemilikan kartu identitas anak untuk tahun 2020 baru mencapai 18,17%. Rendahnya kepemilikan KIA di Sulawesi Selatan disebabkan beberapa Kabupaten/ Kota baru menerapkan KIA pada Tahun 2020.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Sulawesi Selatan antara lain :

1. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatata sipil dengan perangkat daerah kabupaten/ kota;
3. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data administrasi kependudukan berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;
4. Masih minimnya alokasi anggaran dari APBD untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

#### **2.4. Review terhadap RKPD**

Review terhadap rancangan akhir RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Akhir RKPD.

Review terhadap RKPD yang meliputi identifikasi program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan setiap program/kegiatan dapat dilihat pada Tabel T.C.31

TABEL T.C 31  
 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF  
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN AWAL RKP TAHUN 2023						HASIL ANALISA KEBUTUHAN TAHUN 2023					
NO	Program dan Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>					<b>18,278,328,882.98</b>					<b>18,278,328,882.98</b>	
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	12,878,328,882.98	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	12,878,328,882.98	
			Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100%				Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100%		
			Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100%				Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100%		
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	900,000,000.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	900,000,000.00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar, Sulsel	Jumlah Dokumen Perencanaan, Jumlah Kab/Kota, Jumlah Peserta	2 Dokumen, 12 Kab/Kota, 50 Orang	500,000,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar, Sulsel	Jumlah Dokumen Perencanaan, Jumlah Kab/Kota, Jumlah Peserta	2 Dokumen, 12 Kab/Kota, 50 Orang	500,000,000.00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen RKA- SKPD Yang Disusun	1 Dokumen	15,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen RKA- SKPD Yang Disusun	1 Dokumen	15,000,000.00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	15,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	15,000,000.00	

**RANCANGAN AKHIR RENJA 2023**

4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen DPA- SKPD Yang Disusun	1 Dokumen	15,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen DPA- SKPD Yang Disusun	1 Dokumen	15,000,000.00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Yang Disusun	1 Dokumen	15,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Yang Disusun	1 Dokumen	15,000,000.00	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Yang Disusun dan Dilaporkan	5 Dokumen	75,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Yang Disusun dan Dilaporkan	5 Dokumen	75,000,000.00	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar Sulsel	Jumlah peserta, Jumlah Kab/Kota	80 Orang, 12 Kab/Kota	265,000,000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar Sulsel	Jumlah peserta, Jumlah Kab/Kota	80 Orang, 12 Kab/Kota	265,000,000.00	
<b>II.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>% Keterpenuhan Laporan Administrasi Keuangan tepat waktu</b>	100%	8,833,152,591.00	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>% Keterpenuhan Laporan Administrasi Keuangan tepat waktu</b>	100%	8,833,152,591.00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar	ASN Yang Menerima Gaji	60 Orang	8,433,152,591.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar	ASN Yang Menerima Gaji	60 Orang	8,433,152,591.00	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Verifikasi Keuangan	20 Laporan	80,000,000.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Verifikasi Keuangan	20 Laporan	80,000,000.00	
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Akuntansi	5 Laporan	70,000,000.00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Akuntansi	5 Laporan	70,000,000.00	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	3 Laporan	100,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	3 Laporan	100,000,000.00	
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Makassar	Laporan Bahan Tanggapan	6 Laporan	50,000,000.00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Makassar	Laporan Bahan Tanggapan	6 Laporan	50,000,000.00	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Makassar	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14 Laporan	55,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Makassar	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14 Laporan	55,000,000.00	
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Makassar	Jumlah Laporan Prognosis	1 Laporan	45,000,000.00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Makassar	Jumlah Laporan Prognosis	1 Laporan	45,000,000.00	
<b>III.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>% Keterpenuhan Laporan Administrasi Barang Milik Daerah</b>	100%	130,017,322.39	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>% Keterpenuhan Laporan Administrasi Barang Milik Daerah</b>	100%	130,017,322.39	

**RANCANGAN AKHIR RENJA 2023**

1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Laporan	30,944,442.39	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Laporan	30,944,442.39	
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar	Laporan Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	30,000,000.00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar	Laporan Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	30,000,000.00	
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	39,072,880.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	39,072,880.00	
4	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Dokumen Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1 Laporan	30,000,000.00	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Dokumen Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1 Laporan	30,000,000.00	
<b>IV.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>% Keterpenuhan kebutuhan Pegawai</b>	100%	551,808,000.00	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>% Keterpenuhan kebutuhan Pegawai</b>	100%	551,808,000.00	
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Makassar	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 Unit	16,500,000.00	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Makassar	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 Unit	16,500,000.00	
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Makassar	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan yang Tersedia	60 Pasang	55,000,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Makassar	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan yang Tersedia	60 Pasang	55,000,000.00	
3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Makassar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	38,808,000.00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Makassar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	38,808,000.00	
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Makassar	Jumlah Sosialisasi Sistem Informasi Kepegawaian	2 Kali	55,000,000.00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Makassar	Jumlah Sosialisasi Sistem Informasi Kepegawaian	2 Kali	55,000,000.00	
5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	71,500,000.00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	71,500,000.00	
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Makassar	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang Tersedia	4 Orang	55,000,000.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Makassar	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang Tersedia	4 Orang	55,000,000.00	
7	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Makassar	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	72 Orang	130,000,000.00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Makassar	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	72 Orang	130,000,000.00	
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Makassar	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	72 Orang	130,000,000.00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Makassar	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	72 Orang	130,000,000.00	

**RANCANGAN AKHIR RENJA 2023**

V.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		% Keterpenuhan Kebutuhan Administrasi Umum	100%	695,550,969.59	Administrasi Umum Perangkat Daerah		% Keterpenuhan Kebutuhan Administrasi Umum	100%	695,550,969.59	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Makassar	Jumlah Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	15 Unit	11,000,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Makassar	Jumlah Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	15 Unit	11,000,000.00	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Makassar	Jumlah Peralatan dan Peralatan Kantor yang Tersedia	3 Unit	11,000,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Makassar	Jumlah Peralatan dan Peralatan Kantor yang Tersedia	3 Unit	11,000,000.00	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Makassar	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	15 Unit	16,500,000.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Makassar	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	15 Unit	16,500,000.00	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Makassar	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	15 Jenis	66,550,660.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Makassar	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	15 Jenis	66,550,660.00	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Makassar	Jumlah Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	5 Jenis	27,500,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Makassar	Jumlah Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	5 Jenis	27,500,000.00	
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makassar	Jumlah Makanan dan Minuman yang Tersedia	20 Jenis	110,000,000.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makassar	Jumlah Makanan dan Minuman yang Tersedia	20 Jenis	110,000,000.00	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makassar	Jumlah Perjalanan Dinas dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	24 Kali	360,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makassar	Jumlah Perjalanan Dinas dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	24 Kali	360,000,000.00	
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis	1 Laporan	38,000,309.59	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis	1 Laporan	38,000,309.59	
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Makassar	Jumlah Sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Terselenggara	50 Orang	55,000,000.00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Makassar	Jumlah Sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Terselenggara	50 Orang	55,000,000.00	
VI.	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	30 Unit	345,000,000.00	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	30 Unit	345,000,000.00	
1	Pengadaan Mebel	Makassar	Jumlah Unit Mebel Yang Tersedia	20 Unit	60,000,000.00	Pengadaan Mebel	Makassar	Jumlah Unit Mebel Yang Tersedia	20 Unit	60,000,000.00	
2	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Makassar	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Tersedia	10 Unit	250,000,000.00	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Makassar	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Tersedia	10 Unit	250,000,000.00	

**RANCANGAN AKHIR RENJA 2023**

3	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Makassar	Jumlah Aset Tak Berwujud Yang Tersedia		35,000,000.00	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Makassar	Jumlah Aset Tak Berwujud Yang Tersedia		35,000,000.00	
<b>VII</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>% pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	391,000,000.00	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>% pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	391,000,000.00	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Makassar	Jumlah Jasa Komunikasi yang Terpenuhi	1 Unit	11,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Makassar	Jumlah Jasa Komunikasi yang Terpenuhi	1 Unit	11,000,000.00	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Makassar	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Terpenuhi	20 Orang	380,000,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Makassar	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Terpenuhi	20 Orang	380,000,000.00	
<b>VII I.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	34 unit	1,031,800,000.00	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	34 unit	1,031,800,000.00	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makassar	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpenuhi	1 Unit	99,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makassar	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpenuhi	1 Unit	99,000,000.00	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makassar	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional yang Terpenuhi	10 Unit	258,500,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makassar	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional yang Terpenuhi	10 Unit	258,500,000.00	
3	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Makassar	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Terpelihara	20 Unit	8,800,000.00	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Makassar	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Terpelihara	20 Unit	8,800,000.00	
4	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Makassar	Jumlah Aset Tak Berwujud Yang Terpelihara	2 Unit	5,500,000.00	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Makassar	Jumlah Aset Tak Berwujud Yang Terpelihara	2 Unit	5,500,000.00	
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	1 Unit	660,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	1 Unit	660,000,000.00	
<b>B.</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>		<b>Persentase Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk</b>	0,97	1,200,000,000.00	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>		<b>Persentase Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk</b>	0,97	1,200,000,000.00	
			<b>Persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)</b>	97,00%				<b>Persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)</b>	97,00%		
			<b>Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk</b>	100,00 %				<b>Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk</b>	100,00 %		

			<b>Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)</b>	30,00%				<b>Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)</b>	30,00%		
<b>IX.</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Kependudukan</b>		<b>% Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	100%	500,000,000.00	<b>Pelayanan Pendaftaran Kependudukan</b>		<b>% Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	100%	500,000,000.00	
<b>1</b>	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Makassar, Sulsel	Jumlah Peserta Rapat, Jumlah Kab/Kota		200,000,000.00	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Makassar, Sulsel	Jumlah Peserta Rapat, Jumlah Kab/Kota		200,000,000.00	
<b>2</b>	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Makassar, Sulsel	Jumlah Peserta Rapat, Jumlah Kab/Kota	50 Orang, 12 Kab/Kota	150,000,000.00	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Makassar, Sulsel	Jumlah Peserta Rapat, Jumlah Kab/Kota	50 Orang, 12 Kab/Kota	150,000,000.00	
<b>3</b>	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Makassar, Sulsel	Jumlah Peserta, Jumlah Dokumen, Jumlah Kab/Kota yang Melakukan Pelayanan Adminduk	50 Orang, 1 Dokumen, 5 Kab/Kota	150,000,000.00	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Makassar, Sulsel	Jumlah Peserta, Jumlah Dokumen, Jumlah Kab/Kota yang Melakukan Pelayanan Adminduk	50 Orang, 1 Dokumen, 5 Kab/Kota	150,000,000.00	
<b>X.</b>	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>		<b>% Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	100%	350,000,000.00	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>		<b>% Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	100%	350,000,000.00	
<b>1</b>	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Sulsel	Jumlah Kab/Kota yang Difasilitasi, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	24 Kab/Kota, 12 Kab/Kota	200,000,000.00	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Sulsel	Jumlah Kab/Kota yang Difasilitasi, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	24 Kab/Kota, 12 Kab/Kota	200,000,000.00	
<b>2</b>	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Makassar	Jumlah Peserta Sosialisasi		150,000,000.00	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Makassar	Jumlah Peserta Sosialisasi		150,000,000.00	
<b>XI.</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>		<b>% Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	100%	350,000,000.00	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>		<b>% Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	100%	350,000,000.00	
<b>1</b>	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Sulsel	Jumlah Kab/Kota yang Dibina terkait Pendaftaran Penduduk, Jumlah Peserta		100,000,000.00	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Sulsel	Jumlah Kab/Kota yang Dibina terkait Pendaftaran Penduduk, Jumlah Peserta		100,000,000.00	
<b>2</b>	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Makassar, Sulsel	Jumlah Peserta, Jumlah kab/kota	12 Kab/Kota, 60 Orang	250,000,000.00	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Makassar, Sulsel	Jumlah Peserta, Jumlah kab/kota	12 Kab/Kota, 60 Orang	250,000,000.00	

C.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Persentase Bayi ber-Akta Kelahiran	0,97	1,400,000,000.00	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Persentase Bayi ber-Akta Kelahiran	0,97	1,400,000,000.00	
			Persentase Pasangan ber-Akta Nikah	0,34				Persentase Pasangan ber-Akta Nikah	0,34		
			Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	95,00%				Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	95,00%		
			Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran	90,50%				Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran	90,50%		
			Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	0,47				Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	0,47		
			Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan	100%				Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan	100%		
XII .	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi		% Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	750,000,000.00	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi		% Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	750,000,000.00	
1	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Sulsel	Jumlah Peserta, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	50 Orang, 24 Kab/Kota	200,000,000.00	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Sulsel	Jumlah Peserta, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	50 Orang, 24 Kab/Kota	200,000,000.00	
2	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Makassar	Jumlah Peserta, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	50 Orang, 24 Kab/Kota	300,000,000.00	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Makassar	Jumlah Peserta, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	50 Orang, 24 Kab/Kota	300,000,000.00	
3	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Makassar	Jumlah Kab/Kota yang Diberikan Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		250,000,000.00	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Makassar	Jumlah Kab/Kota yang Diberikan Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		250,000,000.00	
XII I.	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		% Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	650,000,000.00	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		% Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	650,000,000.00	
1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Makassar, Sulsel	Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi dan monitoring, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	24 Kab/Kota, 12 Kab/Kota	350,000,000.00	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Makassar, Sulsel	Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi dan monitoring, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	24 Kab/Kota, 12 Kab/Kota	350,000,000.00	

**RANCANGAN AKHIR RENJA 2023**

2	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Makassar, Sulsel	Jumlah Kab/Kota yang Diberikan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil		300,000,000.00	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Makassar, Sulsel	Jumlah Kab/Kota yang Diberikan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil		300,000,000.00	
D.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>		<b>Persentase Ketersediaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan Skala Provinsi</b>	100%	2,200,000,000.00	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>		<b>Persentase Ketersediaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan Skala Provinsi</b>	100%	2,200,000,000.00	
XI V.	<b>Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>		<b>% Pengelolaan Data Kependudukan skala provinsi</b>	100%	300,000,000.00	<b>Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>		<b>% Pengelolaan Data Kependudukan skala provinsi</b>	100%	300,000,000.00	
1	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Peserta Rapat, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	60 Orang, 7 Kab/Kota	300,000,000.00	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Peserta Rapat, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	60 Orang, 7 Kab/Kota	300,000,000.00	
XV .	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>		<b>% Kab/Kota/OPD/ Lembaga yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	100%	1,250,000,000.00	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>		<b>% Kab/Kota/OPD/ Lembaga yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	100%	1,250,000,000.00	
1	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Makassar	Jumlah Peserta, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	50 Orang, 12 Kab/Kota	500,000,000.00	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Makassar	Jumlah Peserta, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	50 Orang, 12 Kab/Kota	500,000,000.00	
2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Makassar	Jumlah Kegiatan Terkait Komunikasi, informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Masyarakat		250,000,000.00	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Makassar	Jumlah Kegiatan Terkait Komunikasi, informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Masyarakat		250,000,000.00	
3	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Makassar	Jumlah Perjanjian Kerjasama, Jumlah Kab/Kota yang Dikunjungi	4 PKS, 12 Kab/Kota	500,000,000.00	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Makassar	Jumlah Perjanjian Kerjasama, Jumlah Kab/Kota yang Dikunjungi	4 PKS, 12 Kab/Kota	500,000,000.00	
XV I.	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>		<b>% Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	100%	650,000,000.00	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>		<b>% Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	100%	650,000,000.00	
1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Makassar	Jumlah Peserta, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	60 Orang, 12 Kab/Kota	400,000,000.00	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Makassar	Jumlah Peserta, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	60 Orang, 12 Kab/Kota	400,000,000.00	

**RANCANGAN AKHIR RENJA 2023**

2	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Makassar	Jumlah Peserta, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	60 Orang, 12 Kab/Kota	250,000,000.00	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Makassar	Jumlah Peserta, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	60 Orang, 12 Kab/Kota	250,000,000.00	
E.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>		<b>% Penyajian Profil dan data Kependudukan</b>	100%	600,000,000.00	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>		<b>% Penyajian Profil dan data Kependudukan</b>	100%	600,000,000.00	
XV II.	<b>Penyediaan Profil Kependudukan</b>		<b>% Ketersediaan Profil dan data Kependudukan skala Provinsi</b>	100%	600,000,000.00	<b>Penyediaan Profil Kependudukan</b>		<b>% Ketersediaan Profil dan data Kependudukan skala Provinsi</b>	100%	600,000,000.00	
1	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Makassar	Jumlah Dokumen, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	3 Dokumen, 12 Kab/Kota	600,000,000.00	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Makassar	Jumlah Dokumen, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	3 Dokumen, 12 Kab/Kota	600,000,000.00	

**2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018–2023. Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

Keterangan : *Tidak ada usulan untuk TC.32 terkait musrembang*

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, antara lain untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam skala nasional dan menjamin kepastian hukum hak sipil penduduk, maka Pemerintah dengan dukungan DPR RI telah memprogramkan 3 (tiga) program strategis nasional di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi **pemutakhiran data kependudukan, penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan penerapan KTP elektronik**. Tiga program strategis nasional tersebut merupakan reformasi mendasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, dalam rangka peningkatan efektivitas pelayanan publik, peningkatan keamanan Negara dan efektivitas perencanaan pembangunan serta perumusan kebijakan pemerintahan. Dengan program tersebut, maka terbangun pula database kependudukan yang online di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.

Melalui akurasi database kependudukan yang berbasis NIK, maka dapat diterbitkan KTP elektronik yang berlaku secara nasional, sehingga tidak diperlukan lagi KTP daerah/local sebagai persyaratan pelayanan publik. KTP elektronik juga mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat karena tidak dapat dipalsukan, sehingga dapat membantu meningkatkan keamanan Negara karena secara otomatis akan mempersempit ruang gerak tindakan kriminal, teroris, TKI ilegal, perdagangan orang dan manipulasi dokumen perbankan. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengamanatkan beberapa perubahan. Pada pasal 79A disebutkan bahwa "Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya". Sebagai implikasi dari amanat Undang-undang tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota menghentikan pemungutan retribusi dari pelayanan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan juga menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik untuk dialokasikan dalam Program Pelayanan pendaftaran Penduduk, Program Pelayanan Pencatatan Sipil dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mulai tahun 2017 sebagai pengalihan dari Dana Tugas Pembantuan Bidang Administrasi Kependudukan yang dialokasikan pada tahun 2014, 2015 dan 2016.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi, serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi dan visi kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023 khususnya pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan mengetahui tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Provinsi Sulawesi Selatan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Karena merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sasaran harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan tujuan perangkat daerah sendiri yang terkait dengan pencapaian kinerja yang diinginkan.

Adapun rumusan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan pada Renstra 2018-2023 yang ingin dicapai adalah ***“Meningkatkan tertib administrasi kependudukan masyarakat”***.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, dirumuskan sasaran yang merupakan bagian integral dalam proses Perencanaan Strategis, yang berfokus kepada tindakan dan alokasi sumberdaya organisasi. Sasaran yang dimaksud adalah Meningkatnya Layanan Administrasi Kependudukan;

Pernyataan Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah beserta indikator kerjanya disajikan dalam 3.1 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKP**

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
					2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Meningkatkan tertib administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kependudukan						78	80	85
			Meningkatnya layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Presentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil			75%	77,5%	80%	
			Meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala provinsi	Indeks kepuasan pemanfaatan data kependudukan			78	80	85	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Keuangan perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD			71	75	81	
				Persentase ASN Nilai SKP kategori baik dan sangat baik			100%	100%	100%	
				Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah			100 %	100 %	100 %	
				Persentase temuan material			0%	0 %	0 %	

**3.3. Program dan Kegiatan Prioritas.**

Rencana Kerja (Renja) Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 terdiri yaitu:

**A. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**

**I. Pelayanan Pendaftaran Kependudukan**

- 1 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
- 2 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi  
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi,
- 3 Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk

**II. Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**

- 1 Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk
- 2 Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk

**III. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**

- 1 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk
- 2 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk

**B. PROGRAM PENCATATAN SIPIL**

**IV. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi**

- 1 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil
- 2 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil
- 3 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

**V. Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**

- 1 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil
- 2 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil

**C. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**VI. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

- 1 Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota

**VII. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**

- 1 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  
Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan
- 2 Masyarakat
- 3 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan

**VIII. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**

- 1 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 2 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

**D. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**

**IX. Penyediaan Profil Kependudukan**

- 1 Penyediaan Data Kependudukan Provinsi

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Rumusan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 terdiri dari 5 (lima) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 64 (enam puluh empat) Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp 14.630.341.593,26 (Empat Belas miliar Enam Ratus Tiga Puluh juta Tiga ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga koma Dua puluh Enam rupiah)**

Berikut disajikan rencana kerja Program dan Kegiatan serta pendanaannya sesuai dengan pagu Indikatif pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 sebagaimana pada Tabel T.C.33 sebagai berikut :

Tabel T-C.33

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NO.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	PERKIRAAN RENCANA TAHUN 2023					PERKIRAAN RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	TARGET	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>					<b>18,278,328,882.98</b>				<b>19,192,245,327.13</b>
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah		100%	12,878,328,882.98			100%	13,522,245,327.13
		Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik		100%				100%	
		Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP		100%				100%	
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100%	900,000,000.00			100%	945,000,000.00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Jumlah Kab/Kota, Jumlah Peserta	Makassar, Sulsel	2 Dokumen, 12 Kab/Kota, 50 Orang	500,000,000.00	APBD		2 Dokumen, 24 Kab/Kota, 50 Orang	525,000,000.00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD Yang Disusun	Makassar	1 Dokumen	15,000,000.00	APBD		1 Dokumen	15,750,000.00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	Makassar	1 Dokumen	15,000,000.00	DAK		1 Dokumen	15,750,000.00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD Yang Disusun	Makassar	1 Dokumen	15,000,000.00	APBD		1 Dokumen	15,750,000.00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Yang Disusun	Makassar	1 Dokumen	15,000,000.00	APBD		1 Dokumen	15,750,000.00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Yang Disusun dan Dilaporkan	Makassar	5 Dokumen	75,000,000.00	DAK		5 Dokumen	78,750,000.00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah peserta, Jumlah Kab/Kota	Makassar Sulsel	80 Orang, 12 Kab/Kota	265,000,000.00	APBD		80 Orang, 24 Kab/Kota	278,250,000.00

**RANCANGAN AKHIR RENJA 2023**

<b>II.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>% Keterpenuhan Laporan Administrasi Keuangan tepat waktu</b>		100%	8,833,152,591.00			100%	9,274,810,220.55
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ASN Yang Menerima Gaji	Makassar	60 Orang	8,433,152,591.00	APBD		63 Orang	8,854,810,220.55
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Verifikasi Keuangan	Makassar	20 Laporan	80,000,000.00	APBD		20 Laporan	84,000,000.00
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi	Makassar	5 Laporan	70,000,000.00	APBD		5 Laporan	73,500,000.00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Makassar	3 Laporan	100,000,000.00	APBD		3 Laporan	105,000,000.00
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Laporan Bahan Tanggapan	Makassar	6 Laporan	50,000,000.00	APBD		6 Laporan	52,500,000.00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Makassar	14 Laporan	55,000,000.00	APBD		14 Laporan	57,750,000.00
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis	Makassar	1 Laporan	45,000,000.00	APBD		1 Laporan	47,250,000.00
<b>III.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>% Keterpenuhan Laporan Administrasi Barang Milik Daerah</b>		100%	130,017,322.39			100%	136,518,188.51
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Makassar	1 Laporan	30,944,442.39	APBD		1 Laporan	32,491,664.51
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Makassar	1 Laporan	30,000,000.00	APBD		1 Laporan	31,500,000.00
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	Makassar	1 Dokumen	39,072,880.00	APBD		1 Dokumen	41,026,524.00
4	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Dokumen Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Makassar	1 Laporan	30,000,000.00	APBD		1 Laporan	31,500,000.00
<b>IV.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>% Keterpenuhan kebutuhan Pegawai</b>		100%	551,808,000.00			100%	579,398,400.00
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Makassar	3 Unit	16,500,000.00			3 Unit	17,325,000.00
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan yang Tersedia	Makassar	60 Pasang	55,000,000.00			60 Pasang	57,750,000.00
3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Makassar	1 Dokumen	38,808,000.00	APBD		1 Dokumen	40,748,400.00
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sosialisasi Sistem Informasi Kepegawaian	Makassar	2 Kali	55,000,000.00	APBD		2 Kali	57,750,000.00
5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Makassar	1 Dokumen	71,500,000.00	APBD		1 Dokumen	75,075,000.00

**RANCANGAN AKHIR RENJA 2023**

6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang Tersedia	Makassar	4 Orang	55,000,000.00	APBD		4 Orang	57,750,000.00
7	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Makassar	72 Orang	130,000,000.00	DAK		72 Orang	136,500,000.00
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Makassar	72 Orang	130,000,000.00	DAK		72 Orang	136,500,000.00
<b>V.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>% Keterpenuhan Kebutuhan Administrasi Umum</b>		100%	695,550,969.59			100%	730,328,518.07
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Makassar	15 Unit	11,000,000.00	APBD		15 Unit	11,550,000.00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan Kantor yang Tersedia	Makassar	3 Unit	11,000,000.00	APBD		3 Unit	11,550,000.00
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	Makassar	15 Unit	16,500,000.00	APBD		15 Unit	17,325,000.00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	Makassar	15 Jenis	66,550,660.00	APBD		15 Jenis	69,878,193.00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Makassar	5 Jenis	27,500,000.00	APBD		5 Jenis	28,875,000.00
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang Tersedia	Makassar	20 Jenis	110,000,000.00	APBD		20 Jenis	115,500,000.00
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	Makassar	24 Kali	360,000,000.00	DAK		24 Kali	378,000,000.00
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis	Makassar	1 Laporan	38,000,309.59	APBD		1 Laporan	39,900,325.07
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Terselenggara	Makassar	50 Orang	55,000,000.00	APBD		50 Orang	57,750,000.00
<b>VI.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</b>		30 Unit	345,000,000.00			33 Unit	362,250,000.00
1	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel Yang Tersedia	Makassar	20 Unit	60,000,000.00	APBD		20 Unit	63,000,000.00
2	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Tersedia	Makassar	10 Unit	250,000,000.00	APBD		10 Unit	262,500,000.00
3	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud Yang Tersedia	Makassar		35,000,000.00	APBD		3 Unit	36,750,000.00
<b>VII.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>% pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		100%	391,000,000.00			100%	410,550,000.00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi yang Terpenuhi	Makassar	1 Unit	11,000,000.00	APBD		1 Unit	11,550,000.00
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Terpenuhi	Makassar	20 Orang	380,000,000.00	APBD		18 Orang	399,000,000.00

**RANCANGAN AKHIR RENJA 2023**

<b>VIII.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>		34 unit	1,031,800,000.00			34 unit	1,083,390,000.00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpenuhi	Makassar	1 Unit	99,000,000.00	APBD		1 Unit	103,950,000.00
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional yang Terpenuhi	Makassar	10 Unit	258,500,000.00	APBD		10 Unit	271,425,000.00
3	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Terpelihara	Makassar	20 Unit	8,800,000.00	APBD		20 Unit	9,240,000.00
4	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud Yang Terpelihara	Makassar	2 Unit	5,500,000.00	APBD		2 Unit	5,775,000.00
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Tepelihara	Makassar	1 Unit	660,000,000.00	APBD		1 Unit	693,000,000.00
<b>B.</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk</b>		0,97	1,200,000,000.00			0,98	1,260,000,000.00
		<b>Persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)</b>		97,00%				98,00%	
		<b>Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk</b>		100,00%				100,00%	
		<b>Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)</b>		30,00%				40,00%	
<b>IX.</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Kependudukan</b>	<b>% Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>		100%	500,000,000.00			100%	525,000,000.00
1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Peserta Rapat, Jumlah Kab/Kota	Makassar, Sulsel		200,000,000.00	APBD		80 Orang, 24 Kab/Kota	210,000,000.00
2	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Peserta Rapat, Jumlah Kab/Kota	Makassar, Sulsel	50 Orang, 12 Kab/Kota	150,000,000.00	APBD		50 Orang, 12 Kab/Kota	157,500,000.00
3	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Peserta, Jumlah Dokumen, Jumlah Kab/Kota yang Melakukan Pelayanan Adminduk	Makassar, Sulsel	50 Orang, 1 Dokumen, 5 Kab/Kota	150,000,000.00	APBD		50 Orang, 1 Dokumen, 12 Kab/Kota	157,500,000.00
<b>X.</b>	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>	<b>% Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>		100%	350,000,000.00			100%	367,500,000.00

**RANCANGAN AKHIR RENJA 2023**

1	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kab/Kota yang Difasilitasi, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	Sulsel	24 Kab/Kota, 12 Kab/Kota	200,000,000.00	APBD		24 Kab/Kota, 12 Kab/Kota	210,000,000.00
2	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Peserta Sosialisasi	Makassar		150,000,000.00	APBD		80 Orang	157,500,000.00
<b>XI.</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>	<b>% Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>		100%	350,000,000.00			100%	367,500,000.00
1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kab/Kota yang Dibina terkait Pendaftaran Penduduk, Jumlah Peserta	Sulsel		100,000,000.00	APBD		24 Kab/Kota	105,000,000.00
2	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Peserta, Jumlah kab/kota	Makassar, Sulsel	12 Kab/Kota, 60 Orang	250,000,000.00	APBD		24 Kab/Kota, 50 Orang	262,500,000.00
C.	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase Bayi ber-Akta Kelahiran</b>		0,97	1,400,000,000.00			0,98	1,470,000,000.00
		<b>Persentase Pasangan ber-Akta Nikah</b>		0,34				0,35	
		<b>Persentase Penerbitan Akta Kelahiran</b>		95,00%				95,50%	
		<b>Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran</b>		90,50%				91,00%	
		<b>Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran</b>		0,47				0,47	
		<b>Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan</b>		100%				100%	
<b>XII.</b>	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi</b>	<b>% Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>		100%	750,000,000.00			100%	787,500,000.00
1	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	Sulsel	50 Orang, 24 Kab/Kota	200,000,000.00	APBD		50 Orang, 24 Kab/Kota	210,000,000.00
2	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	Makassar	50 Orang, 24 Kab/Kota	300,000,000.00	APBD		50 Orang, 24 Kab/Kota	315,000,000.00
3	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Kab/Kota yang Diberikan Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Makassar		250,000,000.00	APBD		24 Kab/Kota	262,500,000.00
<b>XIII.</b>	<b>Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>% Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>		100%	650,000,000.00			100%	682,500,000.00
1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi dan monitoring, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	Makassar, Sulsel	24 Kab/Kota, 12 Kab/Kota	350,000,000.00	APBD		24 Kab/Kota, 24 Kab/Kota	367,500,000.00

**RANCANGAN AKHIR RENJA 2023**

2	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Kab/Kota yang Diberikan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Makassar, Sulsel		300,000,000.00	APBD		24 Kab/Kota	315,000,000.00
<b>D.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase Ketersediaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan Skala Provinsi</b>		100%	2,200,000,000.00			100%	2,310,000,000.00
<b>XIV.</b>	<b>Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>% Pengelolaan Data Kependudukan skala provinsi</b>		100%	300,000,000.00			100%	315,000,000.00
1	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Rapat, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	Makassar	60 Orang, 7 Kab/Kota	300,000,000.00	APBD		60 Orang, 24 Kab/Kota	315,000,000.00
<b>XV.</b>	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>	<b>% Kab/Kota/OPD/ Lembaga yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>		100%	1,250,000,000.00			100%	1,312,500,000.00
1	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Peserta, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	Makassar	50 Orang, 12 Kab/Kota	500,000,000.00	APBD		50 Orang, 24 Kab/Kota	525,000,000.00
2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Terkait Komunikasi, informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Masyarakat	Makassar		250,000,000.00	APBD		24 Kegiatan	262,500,000.00
3	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Perjanjian Kerjasama, Jumlah Kab/Kota yang Dikunjungi	Makassar	4 PKS, 12 Kab/Kota	500,000,000.00	APBD		4 PKS, 24 Kab/Kota	525,000,000.00
<b>XVI.</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>	<b>% Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>		100%	650,000,000.00			100%	682,500,000.00
1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Peserta, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	Makassar	60 Orang, 12 Kab/Kota	400,000,000.00	APBD		60 Orang, 24 Kab/Kota	420,000,000.00
2	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Peserta, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	Makassar	60 Orang, 12 Kab/Kota	250,000,000.00	APBD		60 Orang, 24 Kab/Kota	262,500,000.00
<b>E.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>% Penyajian Profil dan data Kependudukan</b>		100%	600,000,000.00			100%	630,000,000.00
<b>XVII.</b>	<b>Penyediaan Profil Kependudukan</b>	<b>% Ketersediaan Profil dan data Kependudukan skala Provinsi</b>		100%	600,000,000.00			100%	630,000,000.00
1	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen, Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	Makassar	3 Dokumen, 12 Kab/ Kota	600,000,000.00	APBD		3 Dokumen, 24 Kab/ Kota	630,000,000.00

#### **4.1 A. Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah**

Berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah yang berkenaan dengan penentuan isu-isu strategis, akan dijelaskan kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh Gubernur diatur dalam UU No 23 Tahun 2006 dan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mencakup:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
2. Pemberian Bimbingan Supervisi dan Konsultasi Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
3. Pembinaan dan Sosialisasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
4. Penyajian Data Kependudukan Berskala Provinsi Berasal dari Data Kependudukan yang Telah Dikonsolidasikan dan Dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab; dan
5. Koordinasi Pengawasan atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

#### **B. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Sulawesi Selatan antara lain :**

1. Mengoptimalkan kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan perangkat daerah kabupaten/ kota;
3. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data administrasi kependudukan berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;
4. Masih minimnya alokasi anggaran dari APBD untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

**4.2 Pencapaian SDG's**

Dalam rangka mendukung tercapainya SDG's pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil turut berperan aktif dalam rangka tercapainya target SDG's yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat dimana Sasaran SDG's pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Cakupan Akta Kelahiran 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran Skala Provinsi Sulawesi Selatan, adapun Sasaran Cakupan Akta Kelahiran 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran tertuang pada tabel dibawa ini :

<b>PROGRAM</b>	<b>CAPAIAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR / KELUARAN SUB KEGIATAN</b>
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil
		Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil
		Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil

**4.3 Pengentasan Kemiskinan**

Dalam mendukung tercapaian Pengentasan Kemiskinan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal ini sebagai OPD Sporting Data terkait dengan Validasi dan Verivikasi Data Kependudukan, adapun Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan tertuang dibawah ini :

<b>PROGRAM</b>	<b>CAPAIAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR / KELUARAN SUB KEGIATAN</b>
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Ketersediaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan Skala Provinsi	Cakupan Pengelolaan Data Kependudukan skala provinsi

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kaidah Pelaksanaan**

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 merupakan dokumen penting yang harus dilaksanakan oleh OPD guna mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah. Mengingat hal tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Rancangan Akhir Rencana Kerja ini memuat rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil, yang pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi dan DAK Non Fisik;
2. Organisasi Perangkat Daerah dan stakeholders berkewajiban melaksanakan program-program dalam Rencana Kerja dengan sebaik-baiknya;
3. Sekretaris Dinas melalui Kepala Sub Bagian Program perlu menyebarluaskan Rencana Kerja (RENJA) kepada para Kepala Bidang Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Tahun 2023.
4. Kepala Bidang pada lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan menjadikan Rencana Kerja (RENJA) sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2023.

#### **5.2 Penutup**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan urusan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dihadapkan pada sejumlah isu pada tingkat lokal dan nasional yang semakin kompleks. Penyusunan Rancangan Akhir Renja yang dituangkan dalam Perencanaan strategis ini diharapkan dapat mengantisipasi berbagai isu dan perubahan yang tengah terjadi dengan pesat. Rencana Kerja Kegiatan (RENJA) Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan sangat diperlukan dalam rangka upaya meningkatkan perencanaan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya. Rancangan Akhir Renja ini disusun atas dasar potensi dan peluang yang dimiliki, permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta kecenderungan di masa depan demi terwujudnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Perangkat Daerah yang mandiri berbasis

pada misi (*mission-driven organization*) serta dapat berakselerasi cepat dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan.

Dokumen Renja ini senantiasa membuka ruang dan peluang yang cukup signifikan bagi upaya perubahan (*review & rebuild*) sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada, sehingga cukup fleksibel terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis. Dokumen perencanaan yang telah disusun sebaik apa pun tidak akan dirasakan manfaatnya bila tidak diimplementasikan dengan baik pula. Oleh karenanya, dibutuhkan dukungan penuh berbagai pihak yang terkait dan kritik yang membangun, khususnya segenap personil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan demi tercapainya sasaran yang diinginkan untuk menopang keberhasilan terhadap program-program yang dicanangkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan.

Rencana anggaran Program Kegiatan dan Sub kegiatan dalam Rencana Kerja ini diharapkan dapat terealisasi sesuai dengan kebutuhan mengingat jumlahnya masih mengacu pada jumlah pagu indikatif. Namun demikian jumlah tersebut belum sesuai dengan kebutuhan riil untuk tahun 2023, sehingga diharapkan adanya penambahan anggaran yang memadai dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya terkait peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan tugas. Harapan kami, semoga dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dapat diimplementasikan secara bertanggung jawab dan bermanfaat dalam memberikan kontribusi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 ini disusun untuk dapat dijadikan acuan bagi segenap aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan dan untuk diketahui oleh para stakeholder yang berkepentingan.

Semoga apa yang kita rencanakan dan yang kita laksanakan bernilai ibadah dimata Allah SWT, dan berguna bagi bangsa dan negara khususnya bagi Provinsi Sulawesi Selatan yang kita cintai.

Makassar, Juli 2022

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,



**Dra. Hj. SUKARNIATY KONDOLELE, M.M**

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19650606 199003 2 011

**SEKIAN DAN  
TERIMA KASIH**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
TAHUN 2022**